SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1978
TENTANG
TAHANAN SEMENTARA YANG DILAKUKAN OLEH
KOPKAMTIB/LAKSUSDA DALAM PERKARA G30S/PKI/SUBVERSI

MAHKAMAH AGUNG

Jl. Lapangan Banteng Timur No.
1

JAKARTA

Jakarta, 1 April 1978

No : M.A/Pemb/314/78

Lampiran : -

Perihal : Tahanan Sementara Yang Dilakukan Kepada Yth.
Oleh Kopkamtib Laksusda Dalam
Perkara G30S/P.K.I/Subversi

1. Saudara Ketua/Hakim
Pengadilan Tinggi
2. Saudara Ketua/Hakim
Pengadilan Negeri
3. Saudara Ketua Mahkamah
Militer Agung/ Mahkamah
Agung Militer
4. Saudara Ketua Mahkamah
Agung

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 04 TAHUN 1978

Berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang ingin minta kejelasan atau penjelasan mengenai tahanan yang dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda khususnya dalam perkara-perkara G.30.S/PKI/Subversi, dan yang berhubungan dengan pemotongan masa tahanan oleh Hakim, maka sebagai tujuan dari surat kami tanggal 26 Maret 1976 No. M.A/Pan/039/III/76 dan kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1977, No. M.A/Pemb/0158/1977 yang tembusannya ditujukan langsung kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka ingin kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Baik dalam surat tanggal 26 Maret 1976 No M.A/Pan/039/III/76 maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 02 tahun 1977 tanggal 25 Pebruari 1977 No M.A/Pemb/0158/1977, kedua penahanan ialah tahanan sementara justiliel (represip) yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan berdasarkan TAP MPR No X/MPR/1973 jo Keppres No 9 tahun 1974 penahanan dapat dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda untuk keamanan dan ketertiban, yang tidak merupakan

penahanan justitieel adalah berbeda jenis. Dapatlah dikatakan bahwa penahanan sementara yang dimaksudkan dalam Pasal 33 KUHP tersebut pada hakekatnya adalah mengambil kebebasan seorang berdasarkan surat perintah "penahanan bewaring, gevangenneming ataupun gevangenhouding".

2. Apabila dalam putusan Hakim ditentukan bahwa sewaktu selama terhukum itu dalam penahanan sementara dipotong seluruhnya atau sebagian dari pidana pemasyarakatan seperti dinyatakan oleh Pasal 33 KUHP (ayat 1 khususnya), hal demikian dapat diartikan bahwa penahanan yang dipotong dari pidana pemasyarakatan tersebut terutama meliputi penahanan justitieel yang dimaksudkan di atas.
3. a. Terlepas dari persoalan apakah masalah itu masih problematis sifatnya atau tidak, saya persilahkan para Hakim untuk mengadakan penafsiran kata-kata dalam "waktu selama terhukum ada dalam tahanan sementara" dalam Pasal 33 KUHP sebagai waktu yang tidak saja terbatas pada waktu penahanan justitieel, sehingga waktu penahanan prajustitiel atau extra justitiel tercakup di dalam waktu selama terhukum ada dalam penahanan justitiel”
b. Penafsiran demikian khususnya terhadap Pasal 33 ayat 1 KUHP dapat Saudara-Saudara lakukan dengan menyatakan itu dalam putusan Pengadilan dengan jelas dalam diktum ataupun dalam pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut.
4. Kemudian dikatakan oleh Pasal 33 ayat 2 KUHP bahwa waktu selama terhukum ada dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan Hakim Maka pemotongan itu dapat dilakukan oleh Hakim dengan mencantumkan khusus dalam putusannya, apabila tahanan oleh Kopkamtib itu dapat dimasukkan dalam jenis tahanan sementara yang tidak didasarkan atas surat perintah.
5. Maka jelasnya bahwa Pasal 33 (1) dan (2) KUHP Hakim dalam menjalankan tugas/kewajiban untuk mengadakan penafsiran dapat diajarkan penahanan oleh Kopkamtib/Laksusda dengan penahanan sementara seperti dimaksudkan oleh Pasal 33 KUHP tersebut, asal hal ini dilakukan dinyatakan khusus dalam putusan Hakim, baik dalam diktum ataupun dalam pertimbangannya.

Dengan penafsiran demikian dan dengan menyatakan secara khusus dalam putusannya maka Hakim dapat menentukan bahwa waktu selama terhukum ada dalam tahanan sementara dan tahanan pra atau extra justitiel tersebut, dipotong sebagian atau seluruhnya dari pidana pemasyarakatan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

(PROF. OEMAR SENO ADJI, SH)